



**SAMBUTAN DEPUTI PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR
DALAM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KETENAGANUKLIRAN**

Jakarta, 8 Maret 2023

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi Bapak/Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat:

1. Plt. Kepala BAPETEN, Bapak Sugeng Sumbarjo

Yang saya hormati:

2. Bapak/Ibu dari perwakilan Kementerian dan Lembaga yang terkait
3. Bapak/Ibu Akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi
4. Bapak/Ibu perwakilan Pemerintah Daerah
5. Bapak/Ibu perwakilan Asosiasi terkait ketenaganukliran
6. Bapak/Ibu perwakilan Pemegang Izin bidang Instalasi Nuklir, bidang Industri, dan bidang Kesehatan.
7. Para undangan sebagai stakeholder BAPETEN yang telah hadir dalam kegiatan konsultasi publik, dan
8. Bapak/Ibu hadirin yang saya banggakan

Pertama-tama kami sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian atas kesediaannya memenuhi undangan BAPETEN dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Ketenaganukliran.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, penyebarluasan Rancangan Undang-Undang harus dilakukan oleh instansi pemrakarsa dalam hal ini BAPETEN sejak penyusunan, pembahasan Rancangan Undang-Undang hingga pengundangan Undang-Undang. Lebih lanjut, UU 13 tahun 2022 tersebut juga mengamanatkan pentingnya penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab

dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (***right to be heard***) kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (***right to be considered***) dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (***right to be explained***). Oleh karena itu, kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak dan masyarakat sekaligus untuk memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan Rancangan Undang-Undang pengganti Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Konsultasi ini dihadiri 180 instansi baik secara luring maupun daring dengan sekitar 20% Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, 60 % Pemegang Izin/Pelaku Usaha, 10% Assosiasi, dan 10% Perguruan Tinggi.

UU 10 Tahun 1997 sejak diberlakukan pada tahun 1997 sampai saat ini belum pernah dilakukan perubahan ataupun penyesuaian. Sementara itu selama 20 tahun telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan baik secara internasional maupun nasional. Perubahan kondisi sosial maupun perkembangan teknologi khususnya di bidang nuklir juga banyak terjadi selama rentang waktu tersebut. Diharapkan dari pertemuan hari ini dapat membawa kemajuan bagi pengaturan ketenaganukliran untuk ke depan dan menjadi kesempatan yang baik untuk membangun negeri ini di zaman yang kompetitif.

Pembahasan rancangan undang-undang ini telah melalui berbagai tahap, termasuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, namun dengan diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang saat ini menjadi PERPPU No. 2 Tahun 2022, perlu dan telah dilakukan beberapa penyesuaian rancangan Undang-undang Ketenaganukliran tersebut dengan Undang-undang Cipta Kerja. Selama penyusunan dan pembahasan RUU tersebut berbagai dinamika terjadi dalam perkembangannya, antara lain terintegrasinya Badan Pelaksana dalam hal ini BATAN ke dalam BRIN, pembahasan RUU energi baru dan energi terbarukan, dan diterbitkannya UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa kegiatan terkait Penggantian RUU Ketenaganukliran yang telah dilakukan, dapat kami informasikan sebagai berikut:

- Tahun 2013 telah dilakukan penyusunan “Analisis dan Evaluasi tentang Peraturan Perundang-Undangan Ketenaganukliran” – yang merupakan kerjasama BPHN, BAPETEN, BATAN, KEMENRISTEK, UI;
- Tahun 2015 telah dilakukan Kajian UU 10/1997 tentang Ketenaganukliran; kerjasama BAPETEN – FH UI, pembahasan NA RUU Keamanan Nuklir (KN) oleh PAK/L Penyusun RUU KN;

- Tahun 2017 masuk ke LONGLIST PROLEGNAS 2015-2019, Konsultasi Publik NA RUUK dengan melibatkan berbagai Universitas, pemuktahiran NA RUUK bersama FH UNAIR;
- Pembahasan RUUK dengan PAK/L Penyusun RUUK dilaksanakan tahun 2018 dan 2019;
- REVIEW MISSION – OLA IAEA untuk memberikan masukan terhadap RUUK dilakukan tahun 2018 dan 2021;
- Tahun 2019 masuk dalam LONGLIST PROLEGNAS 2020-2024, dan diikuti penyelarasan NA RUUK dengan BPHN pasca pembahasan PAK/K;
- Tahun 2020 telah dilakukan Inisiasi Harmonisasi RUUK oleh Kemenkumham namun demikian draft NA serta batang tubuh RUUK dikembalikan ke BAPETEN untuk dilakukan sinkronisasi dengan UU Cipta Kerja yang diundangkan pada tahun 2020.
- Tahun 2021 telah dilakukan IAEA Review Mission untuk memperoleh masukan dari Office of Legal Affair, IAEA terhadap RUUK setelah dilakukan penyesuaian dengan UUCK.
- Tahun 2022 telah dilakukan Finalisasi naskah akademik RUUK, pembahasan penyelarasan naskah akademik dengan BPHN, dan pengajuan permohonan penyelarasan dan harmonisasi.

Selain sebagai pelaksanaan amanat untuk penyebarluasan Rancangan Undang-Undang sesuai UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan, melalui pertemuan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencermati rumusan ketentuan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang ini. Pada saat ini status Rancangan Undang-Undang sedang dalam persiapan untuk dilakukan penyelarasan dengan BPHN dan harmonisasi oleh Kemenkumham.

Dalam kesempatan yang baik ini, kami mengharapkan Bapak/Ibu terinformasi dan dapat membantu dalam penyebarluasan informasi mengenai pembentukan RUUK ke masyarakat dan instansi masing-masing. Selain itu, kami sangat mengapresiasi masukan dari Bapak/Ibu hadirin terhadap draft RUU Ketenaganukliran yang telah kami kirimkan baik melalui forum ini maupun melalui media lainnya.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga konsultasi publik hari ini berjalan lancar. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya kepada kita semua, terima kasih.

Jakarta, 8 Maret 2023
Dra. Dahlia C. Sinaga, M.T.
Deputi PKN – BAPETEN

